

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS  
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA  
LISTRIK (P2TL) PADA PT PLN (Persero) ULP TEGAL  
TIMUR**



**TUGAS AKHIR**

**OLEH :**

**BANI PAJAR ROMADHON**

**NIM 18031084**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul:

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAKSANAAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) PADA PT PLN  
(Persero) ULP TEGAL TIMUR.

Oleh mahasiswa:

Nama : Bani Pajar Romadhon

NIM : 18031084

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing  
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 26 Juli 2021

Pembimbing I,



Ririh Sri H. SE, MM, CTT  
NIPY. 04.015.215

Pembimbing II,



Dewi Sulistyowati SE, CAAT  
NIPY. 12.013.162

## LEMBAR PENGESAHAN

Tugas akhir yang berjudul:

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAKSANAAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) PADA PT PLN  
(Persero) ULP TEGAL TIMUR.

Oleh:

Nama : Bani Pajar Romadhon

NIM : 18031084

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 26 Juli 2021

1. Ririh Sri H., SE, MM, CTT  
Ketua Sidang



2. Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si, CTT  
Penguji I



3. Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak, CAAT  
Penguji II



Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA  
NIPY. 09.011.062

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul "ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) PADA PT PLN (Persero) ULP TEGAL TIMUR.", beserta isinya adalah benar- benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran ata tulis saya ini.

Tegal, 26 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Bani Pajar Romadhon  
NIM. 18031084

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Bani Pajar Romadhon

NIM : 18031084

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan atau formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan atau mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis atau pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 26 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Bani Pajar Romadhon  
NIM: 18031084

## **HALAMAN MOTTO**

"Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya."(Imam Syafii)

"Jika seorang mencari ilmu, maka itu akan tampak di wajah, tangan, dan lidahnya serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah."( Hasan al-Bashri)

“Hidup ini bukan kamu sukses atau tidak, bukan menang atau kalah. Tapi Hidup didunia ini apakah kamu bertahan berjuang bergantung pada Allah dalam keadaan apapun juga.” (Emha Ainun Nadjib)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tugas akhir ini di persembahkan untuk :

1. Tugas akhir ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu.
2. Tugas akhir ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan, sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
3. Segenap Civitas Akademika Politeknik Tegal
4. Teman–teman Seprodi, Semangat Terus dan Sukses Selalu
5. Teman–teman Kerja yang sudah memberikan semangat dan dukungannya.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya hingga terselesaikannya Penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) PADA PT PLN (Persero) ULP TEGAL TIMUR.”

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan saudara-saudara yang telah memberikan do'a dan memberikan semangat kepada penulis. Selain itu juga penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Politeknik Harapan Bersama Tegal:

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MP, P, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priyatna Sari, SE, MSi, AK, CA, selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Ririh Sri H, SE, MM, CTT, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dewi Sulistyowati SE, CAAT, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan banyak bantuan dan bimbingan hingga terselesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Muhammad Ilham Budi Setiawan selaku Junior Officer Pembacaan Meter dan Pembuatan Rekening di ULP Tegal Timur yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.
6. Bapak Usman selaku Junior Teknik Pengendalian Susut dan PJU di ULP Tegal Timur yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.



7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan moral kepada penulis, hingga terselesaikan laporan Tugas Akhir ini.
8. Rekan tim saya Hendro Wijayanto, Rori Abdillah dan Amir, yang telah memberikan arah serta dorongan supaya saya tidak malas untuk mengerjakan Laporan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman kampus yang telah memberikan arahan serta semangat.
10. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu hingga selesainya Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar lebih baik lagi dalam menyusun selanjutnya. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Tegal, 26 Juli 2021



Bani Pajar Romadhon

NIM: 18031084

## ABSTRAK

Bani Pajar Romadhon. 2021. Analisis Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur. Program Studi : Diploma Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I : Ririh Sri H., SE, MM, CTT; Pembimbing II : Dewi Sulistyowati SE, CAAT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal atas pelaksanaan program penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara serta dokumentasi, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan komponen Committee Of Sponsoring Organizations (COSO). Indikator yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini terdapat 5 komponen yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pengawasan. Dari hasil analisis terhadap masing-masing indikator menunjukkan pengendalian internal atas pelaksanaan program P2TL telah terlaksana dengan baik. Akan tetapi dari kelima komponen pengendalian internal pada hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Aktivitas Pengendalian masih ada kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku oleh petugas pelaksana lapangan P2TL. Maka, dalam hal ini untuk penanggung jawab P2TL memperketat pengawasan P2TL dengan cara menghimbau serta melakukan pembinaan kepada petugas pelaksana lapangan P2TL agar taat dan menjunjung tinggi nilai tanggung jawab yang telah diberikan serta mengingatkan setiap penyimpangan yang dilakukan petugas P2TL akan ada sanksi yang dikenakan.

**Kata Kunci** : Pengendalian Internal, Pelaksanaan, Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Committee Of Sponsoring Organizations (COSO).

## ABSTRAK

**Romadhon, Bani Pajar.** 2021. *Analysis of Internal Control the Implementation of Controlling the Use of Electric Power (P2TL) of PT PLN (Persero) ULP East Tegal. Study Program : Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Ririh Sri H., S.E., M.M., CTT; Co-Advisor: Dewi Sulistyowati S.E., CAAT.*

*This study was aimed to find out about the internal control over the implementation of the control program for the use of electricity (P2TL) at PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur. The used data collection methods were observation, interviews and documentation, using a qualitative descriptive methodology and using the Committee Of Sponsoring Organizations (COSO) component. The indicators used in answering this research problem have 5 components, namely the Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication and Supervision. The results of the analysis of each indicator showed that the internal control over the implementation of the P2TL program has been well implemented. However, from the five components of internal control, the results of the research and discussion show that in Control Activities there is still the possibility of behavioral deviations by P2TL implementing officers. So, in this case, the person in charge of P2TL tightens the supervision of P2TL by urging and providing guidance to P2TL field officers to obey and uphold the value of the responsibility that has been given and reminding that any irregularities committed by P2TL officers will be subject to sanctions.*

**Keywords :** *Internal Control, Implementation, Controlling the Use of Electricity (P2TL). Committee Of Sponsoring Organizations (COSO).*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Batasan Masalah .....	11
1.6 Kerangka Berpikir.....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1 Pengertian Pengendalian Internal .....	16
2.1.1 Aktivitas Pengendalian .....	17
2.1.2 Manfaat Pengendalian Internal.....	18
2.1.3 Tujuan Pengendalian Internal.....	19
2.1.4 Jenis Pengendalian Internal.....	19

2.1.5	Pengendalian Internal menurut COSO .....	20
2.1.6	Komponen Pengendalian Internal COSO.....	20
2.1.7	Unsur-unsur Pengendalian Internal .....	22
2.2	Konsep Pelaksanaan .....	23
2.3	Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).....	25
2.3.1.	Definisi P2TL.....	25
2.3.2.	Jenis dan Golongan P2TL .....	29
2.4	Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1	Lokasi Penelitian.....	36
3.2	Waktu Penelitian.....	36
3.3	Jenis Data.....	36
3.4	Sumber Data .....	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6	Metode Analisis Data.....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1	Gambaran Umum PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur .....	40
4.1.1	Sejarah PT PLN (Persero).....	40
4.1.2	Logo PT PLN (Persero) .....	42
4.1.3	Maksud dan Tujuan PT PLN (Persero) .....	44
4.1.4	Job Description .....	44
4.2	Hasil Analisis Data .....	46
4.2.1.	Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan P2TL Di PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur.....	46
4.3	Pembahasan .....	55
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
5.1	Kesimpulan .....	60
5.2	Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>63</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir.....	12
Gambar 2,1 Jenis dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik.....	21
Gambar 4.1 Logo PLN.....	40
Gambar 4.2 Bidang Persegi Panjang.....	41
Gambar 4.3 Petir atau Kilat.....	41
Gambar 4.4 Tiga Gelombang.....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Realisasi Pelanggaran PLN ULP Tegal Timur Tahun 2020.....	6
Tabel 1.2 Rekapitulasi Realisasi Pelanggaran dan kelainan PLN ULP Tegal Timur Tahun 2020.....	7
Tabel 1.3 Rekapitulasi Pendapatan P2TL PLN ULP Tegal Timur Tahun 2020.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan P2TL pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur .....	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pelayanan jasa penjualan energi listrik dan pengelola sumber daya listrik Negara. Sesuai dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” serta “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” maka PLN dibawah wewenang penuh Negara termasuk pendapatan dan laba yang akan dikelola oleh pemerintah. PLN sebagai BUMN diharapkan dapat memberikan kualitas jasa pelayanan yang baik, memuaskan konsumen serta menyejahterakan masyarakat luas dan mampu memenuhi kebutuhan energi listrik untuk pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan kegiatan yang rumit karena sifatnya yang multifaset dan multidimensional. Karakteristik demikian merupakan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya bidang-bidang yang menjadi objek pembangunan termasuk bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, social budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, administrasi pemerintahan negara (Sondang, 2012)<sup>[1]</sup>. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata



materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia. Menurut (Mikrajuddin, 2007)<sup>[2]</sup> listrik adalah suatu bentuk energi. Selain BBM, listrik telah menjadi bentuk energy terpenting bagi kehidupan. Pengertian listrik menurut para ahli tidak lepas dari kehadiran Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan di Indonesia. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 17 status PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Fungsi dari perusahaan perseroan ini adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, dalam jumlah dan mutu yang memadai serta menumpuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah dibidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Dengan kehidupan yang maju banyak sekali permasalahan-permasalahan muncul dari kehidupan masyarakat yang semuanya bersumber dari kondisi ekonomi dan sosial seperti halnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan beberapa manusia demi kelangsungan hidup mereka. Segala macam cara dilakukan dan dapat bersaing mengikuti perkembangan zaman dari cara yang baik juga cara melanggar hukum dan merugikan orang lain. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik, sangat diakui bahwa listrik merupakan bagian yang penting bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu PLN sebagai perusahaan satu-satunya yang mengurus ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya.

Oleh karenanya, sebagai pihak penyedia jasa kelistrikan nasional PLN mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal demi memuaskan konsumen dan memenuhi hak konsumen. Namun PLN juga menyadari akan banyaknya permasalahan terkait dengan penyediaan listrik di masyarakat. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya baik karena faktor teknis maupun non teknis. Salah satu penyumbang tingginya losses (kehilangan daya) adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang memiliki maksud tidak baik terhadap penggunaan listrik. Oleh karena itu dalam rangka menekan losses dari faktor non teknis ini, PLN mengeluarkan kebijakan berupa program penertiban tenaga listrik atau disebut P2TL. Namun pada pelaksanaan P2TL

dilapangan muncul permasalahan dalam berbagai jenis pelanggaran baik dari dalam masyarakat itu sendiri ataupun dari pihak pelaksana P2TL.

Dasar utama PLN (Persero) mengeluarkan kebijakan P2TL sebenarnya merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non teknis. Disamping itu kebijakan P2TL ini secara tidak langsung dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan ketenagalistrikan seperti diatur dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Ketenagalistrikan.

Kebijakan penerapan P2TL itu sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) NO. 088-Z.P/DIR/2016<sup>[4]</sup> tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Produk kebijakan P2TL sendiri sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur masalah kelistrikan yang berlaku saat ini antara lain :

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Serta Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2016.

Menurut SK yang dikeluarkan oleh direktur PT PLN (Persero) yaitu SK.NO.088-Z.P/DIR/2016<sup>[3]</sup> Tentang P2TL (penertiban pemakaian tenaga listrik). P2TL merupakan produk kebijakan atau program yang secara umum

mengatur mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP), PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3), PLN Wilayah/Distribusi secara struktural sesuai dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing. Kemudian berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan pasal 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik perlu menetapkan peraturan direksi PT PLN Persero tentang Penertiban Tenaga Listrik (P2TL).

Kabupatèn Têgal adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat laut provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki luas 876,10 km<sup>2</sup>, serta merupakan salah satu kabupaten terpadat di Jawa Tengah. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tegal](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tegal)). Di Kabupaten Tegal bagian timur yang meliputi Kecamatan Kramat, Tarub, Suradadi, Kedungbanteng dan Warureja, angka penyalahgunaan dan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik di wilayah tersebut cukup tinggi, seperti yang terjadi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Area Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tegal Timur yang terletak di Jl. Raya Dampyak no. 1A Kramat. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Area ULP Tegal Timur memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola pendistribusian tenaga listrik di Kabupaten Tegal bagian timur dan sekitarnya. Berikut data yang menunjukkan jumlah

pelanggaran listrik yang terjadi tiap bulan pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur tahun 2020.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Realisasi Pelanggaran PLN ULP Tegal Timur Tahun

NO	Bulan	Realisa Pelanggaran				
		P I	P II	P III	P IV	Total
1	Januari		1	2	1	4
2	Februari		3	2	2	7
3	Maret		1	1	5	7
4	April			3	2	5
5	Mei			2	1	3
6	Juni	12	4	3	4	23
7	Juli	1	3	2	7	13
8	Agustus			5	1	6
9	Septembe	1	1	1	7	10
10	Oktober		2	5	1	8
11	November		2	4	1	7
12	Desember		1	2	1	4
Total		<b>14</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>97</b>

Sumber : PLN ULP Tegal Timur 2020

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 jumlah pelanggaran P2TL yang terjadi pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur mengalami Fluktuasi jumlah pelanggaran, dari awal tahun sampai bulan pertahan tahun terjadi kenaikan, setelah itu terjadi penurunan dalam beberapa bulan.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Realisasi Pelanggaran dan kelainan PLN ULP Tegal Timur Tahun 2020.

No	Bulan	Jumlah Pemeriksaan Pelanggan	Jumlah Penyimpangan Pemakaian		Pelanggan Bersih	Pelanggaran & Kelainan (%)
			Pelanggaran	Kelainan		
1	Januari	500	4	64	432	14 %
2	Februari	420	7	51	362	14 %
3	Maret	352	7	34	311	12 %
4	April	410	5	4	401	2 %
5	Mei	260	3	23	234	10 %
6	Juni	531	23	16	492	7 %
7	Juli	567	13	20	534	6 %
8	Agustus	463	6	30	427	8 %
9	Septembe	514	10	38	466	9 %
10	Oktober	463	8	30	425	8 %
11	November	518	7	29	482	7 %
12	Desember	467	4	40	423	9 %
<b>Total</b>		5465	97	379	4989	
<b>Rata-Rata Pelanggaran Perbulan</b>						9 %

Sumber : PLN ULP Tegal Timur 2020

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 jumlah pelanggaran dan kelainan P2TL yang terjadi pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur mengalami Fluktuasi jumlah pelanggaran dan kelainan, dari awal tahun sampai bulan pertahan tahun terjadi kenaikan, setelah itu terjadi penurunan dalam beberapa bulan dikarenakan adanya penerapan Work From Home selama April dan Mei karena pandemi covid 2019, setelah itu terjadi penurunan dalam beberapa bulan. Kemudian rata – rata pelanggaran terhadap jumlah pelanggan yang di periksa adalah 9 %.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Pendapatan P2TL PLN ULP Tegal Timur Tahun 2020

NO	Bulan	Realisa Tagihan Susulan	
		Pemakaian Energi (KWH)	Total (Rp)
1	Januari	60.417	Rp 62.242.573
2	Februari	54.239	Rp 47.036.165
3	Maret	44.880	Rp 41.446.786
4	April	14.113	Rp 7.174.408
5	Mei	15.208	Rp 11.291.922
6	Juni	51.244	Rp 51.310.567
7	Juli	55.795	Rp 51.200.628
8	Agustus	29.938	Rp 32.397.006
9	September	45.873	Rp 41.987.109
10	Oktober	53.788	Rp 51.254.383
11	November	67.833	Rp 89.380.498
12	Desember	73.625	Rp 103.369.578
Total		<b>566.953</b>	<b>Rp 590.091.623</b>

Sumber : PLN ULP Tegal Timur 2020

Pelanggan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah ULP Tegal Timur banyak yang secara tidak sadar melakukan pelanggaran pemakaian listrik, kasus yang sering terjadi adalah pada saat petugas datang untuk melakukan pengecekan rutin ternyata meteran listrik ditemukan dalam keadaan segel yang terdapat pada meteran rusak diseraai ditemukan pengawatan yang sudah tidak standar. Hal ini merupakan pelanggaran pemakaian listrik yang mungkin dilakukan dengan memperlambat laju meter listrik, mencuri listrik dari instalasi listrik lain bahkan sebagai korban pencurian instalasi listrik. Banyak pelanggan yang merasa tidak melakukan pelanggaran atau hanya sebagai korban pencurian instalasi listrik namun pelanggan tersebut yang tetap harus membayar denda pelanggaran.

Dengan adanya pelanggaran yang terjadi ini PT PLN (Persero) mengalami kerugian atau kehilangan susut daya listrik. Salah satu penyumbang tingginya losses (kehilangan daya) adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang memiliki maksud tidak baik terhadap penggunaan listrik. Oleh karena itu dalam rangka menekan losses dari faktor non teknis ini, PLN mengeluarkan kebijakan berupa program penertiban tenaga listrik atau disebut P2TL. Namun pada pelaksanaan P2TL dilapangan muncul permasalahan dalam berbagai jenis pelanggaran baik dari dalam masyarakat itu sendiri ataupun dari pihak pelaksana P2TL, dalam melaksanakan tugas. Sehingga, PLN perlu meninjau kembali sistem pengendalian intern yang selama ini berjalan atas pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dalam mealaksanakan tugas. Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memilih judul “ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) PT. PLN (Persero) ULP TEGAL TIMUR”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pengendalian internal pada pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui pengendalian internal pada pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang didapat peneliti yaitu untuk mengaplikasikan teori teori yang didapat selama berada di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di lapangan, serta bertambahnya wawasan mengenai pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di ULP Tegal Timur.

2. Bagi PT PLN (Persero)

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur yaitu sebagai referensi apakah dalam pelaksanaan program P2TL sudah berjalan dengan baik atau belum.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi dunia akademis adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara sebagai referensi guna memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan terhadap penelitian dengan topik yang sama.

## 1.5 Batasan Masalah

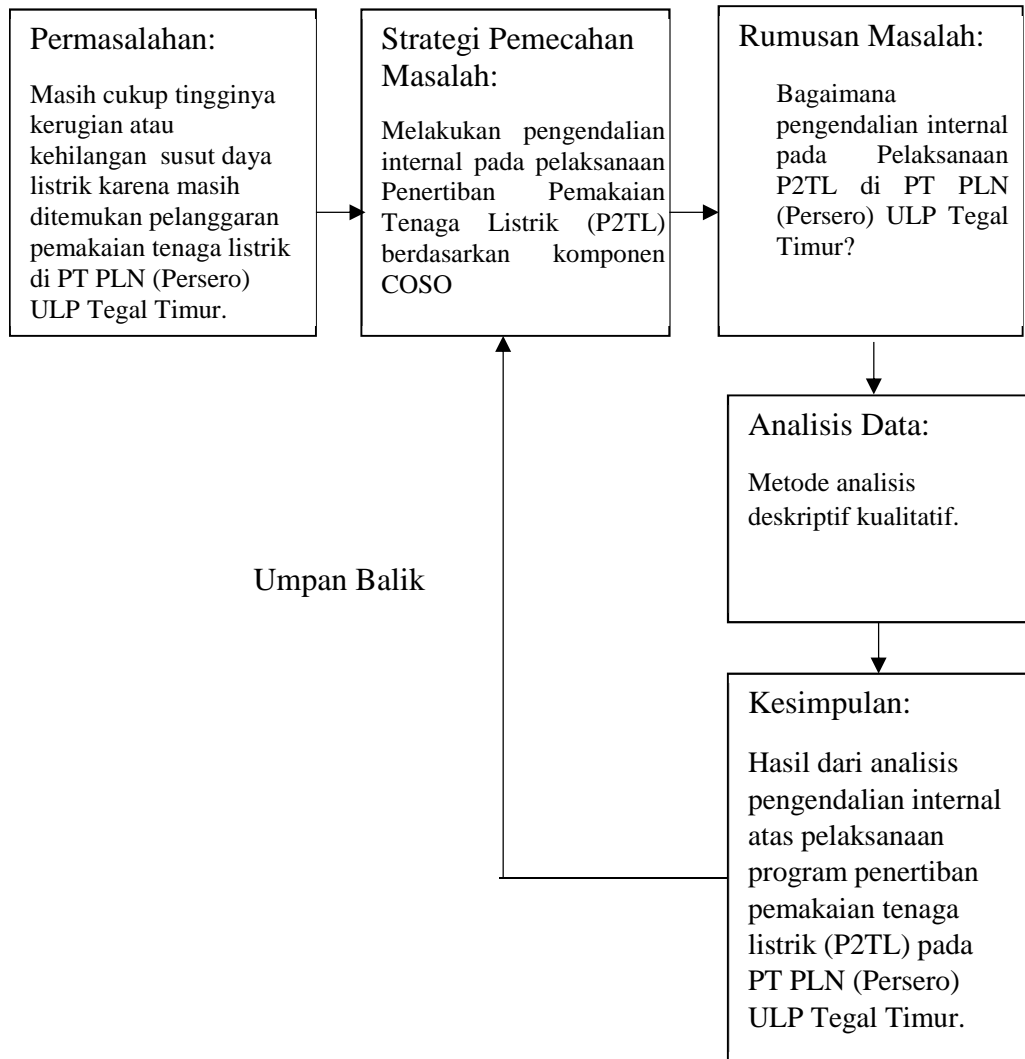
Agar permasalahan penelitian tidak melebar dan terfokus pada tujuan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu:

1. Mengetahui perbandingan pengendalian internal pada Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur. dengan komponen *Committee Of Sponsoring Organizations (COSO)*.
2. Obyek penelitian hanya dilakukan pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur.

## 1.6 Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka dibuatlah kerangka berfikir yang akan mengacu pada pendapat teoritis dan pakar, akan tetapi lebih dikonkritkan dalam bentuk penelitian, yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah : tahap pra pemeriksaan, tahap pemeriksaan dan tahap pasca pemeriksaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman

pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

#### **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian landasan teoritis yang mendukung penelitian, seperti definisi pengendalian internal, unsur pengendalian internal, komponen pengendalian internal, teori listrik, konsep pelaksanaan, program penertiban pemakaian tenaga listrik, kerangka berpikir dan penelitian terdahulu.

#### **BAB III       METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

#### **BAB IV        HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

### 3. Bagian akhir

## LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal dapat menjadi strategi yang cocok untuk mendukung sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal dilakukan untuk tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, maupun tindakan penyimpangan lainnya.

Pengendalian internal biasanya akan mutlak diperlukan seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya transaksi/bisnis perusahaan. Untuk menjalankan pengendalian internal secara baik tentu saja harus diikuti dengan kerelaan perusahaan untuk mengeluarkan beberapa tambahan biaya. Sistem pengendalian internal akan dijumpai dalam perusahaan yang dimana kategori ukuran bisnisnya adalah menengah ke atas. Menurut Sujarweni (2016:69)<sup>[4]</sup>, pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan.

TIMBooks (2015:36)<sup>[5]</sup> mendefinisikan pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya menurut Effendi (2016:78)<sup>[6]</sup> pengendalian internal (*internal control*) merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh direksi dan komisaris,

manajemen dan sumber daya manusia (SDM) lainnya dalam suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Hery (2016:159)<sup>[7]</sup> menyatakan bahwa pengendalian intenal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan pemsahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan pemsahaan. Yang dimaksud dengan ketentuan disini bisa saja meliputi peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, hukum bisms, undang-undang anti korupsi dan sebagainya. Demikian juga pengendalian intenal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial pemsahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manjemen.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Atau dengan kata lain pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang

ditetapkan perusahaan. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang digunakan manajemen perusahaan untuk mengusahakan dalam mencapai suatu akhir dari kegiatan operasional maupun administrasi perusahaan.

### **2.1.1 Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan organisasi untuk mengurangi risiko dan mencapai tujuan pengendalian. Aktivitas pengendalian meliputi pengendalian aliran pekerjaan, pembatasan akses ke aset dan informasi, rekonsiliasi catatan dengan bukti fisik aset, review kinerja, pengendalian aplikasi, serta pengendalian umum.

Pengendalian aliran pekerjaan digunakan untuk mengendalikan suatu proses dari satu kejadian ke kejadian berikutnya. Pengendalian aliran pekerjaan berfokus pada tanggung jawab atas kejadian, urutan kejadian, dan aliran informasi antara kejadian.

Pembatasan akses ke aset dan informasi cara paling penting untuk mengamankan aset seperti kas, persediaan, peralatan, dan data adalah dengan membatasi akses hanya bagi karyawan yang mengerjakan tugasnya. Untuk membatasi akses ke aset, aset fisik disimpan di tempat yang aman. Sebagai contoh, gudang hanya boleh dimasuki oleh karyawan yang mengambil, mengirim dan menerima barang. Akses ke data dapat dibatasi dengan menggunakan *pass word*.



Riview kinerja meliputi analisis kinerja dengan membandingkan hasil sesungguhnya dengan anggaran, forecast standar, atau data periode sebelumnya; analisis data; identifikasi maslaah; dan pengambilan tindakan koreksi.

Pengendalian aplikasi berlaku untuk setiap aplikasi Sistem Imformasi yang digunakan perusahaan. Misalnya aplikasi pelayanan pelanggan, aplikasi manajemen sasaran operasi.

Pengendalian umum merupakan pengendalian yang lebih luas yang berkaitan dengan lingkungan pemrosesan transaksi. Pengendalian terhadap input yang merupakan bagian dari pengendalian umum dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dan validitas entry data.

### **2.1.2 Manfaat Pengendalian Internal**

Menurut (Oktario Gufandri, 2016)<sup>[8]</sup> manfaat pengendalian internal, yaitu :

1. Pengendalian PREVENTIF  
Mencegah terjadinya kesalahan, secara otomatis dilakukan pengendalian/pengecekan. Dirancang untuk mencegah terjadinya penyelewengan
2. Pengendalian DETEKTIF  
Mendeteksi kapan kesalahan terjadi dan dilakukan perbaikan. Dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan.
3. Pengendalian KOREKTIF

Memberikan umpan balik berupa informasi kepada manajemen untuk memperbaiki akibat terjadinya kesalahan. Direncang untuk mengkoreksi kesalahan atau penyelewengan yang terdeteksi.

### **2.1.3 Tujuan Pengendalian Internal**

Menurut (Rusdiono, 2021)<sup>[8]</sup> tujuan pengendalian internal, yaitu:

1. Menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
2. Memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan.
4. Memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat.
5. Menjaga aset perusahaan.
6. Menjamin keamanan operasional perusahaan.

### **2.1.4 Jenis Pengendalian Internal**

Menurut (Ma'ruf, 2020)<sup>[9]</sup> Jenis pengendalian internal terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. Pengendalian internal Akuntansi (internal accounting control) yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan terutama untuk menjaga harta kekayaan perusahaan dan mengecek keandalan data akuntansi.

2. Pengendalian internal Administrasi (internal administration control) yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

### **2.1.5 Sistem Pengendalian Menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)***

Definisi Committee of Sponsoring Organization (COSO tentang sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini:

- Efektivitas dan efisiensi operasi.
- Keandalan pelaporan keuangan.
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

### **2.1.6 Komponen Pengendalian Internal**

Komponen Pengendalian Internal COSO Arens (Kalendesang et al., 2017)<sup>[10]</sup>, sebagai berikut:

#### **1. Lingkungan pengendalian**

Lingkungan pengendali internal terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur menggambarkan keseluruhan sikap manajemen, direksi, dan pemilik dari suatu entitas atas pengendalian internal dan pentingnya pengendalian internal tersebut terhadap entitas. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, beberapa elemen penting diantaranya yaitu:

- a Integritas dan nilai etika
- b Komitmen terhadap kompetisi
- c Partisipasi dewan direksi dan komisaris atau komite audit
- d Filosofi manajemen dan gaya operasi
- e Struktur organisasi
- f Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

## 2. Penilaian resiko

Menilai resiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal. Penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Resiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan.

## 3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur. Kemungkinan terdapat banyak aktivitas pengendalian pada setiap entitas, termasuk pengendalian secara manual dan pengendalian secara otomatis. Aktivitas pengendalian tersebut umumnya termasuk kedalam salah satu dari kelima jenis aktivitas berikut:

- a Pemisahan tugas yang memadai
- b Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas
- c Dokumen dan catatan yang memadai
- d Pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan
- e Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen

#### 4. Informasi dan komunikasi

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entita dan untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait.

#### 5. Pengawasan

Aktifitas pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuannya dan dimodifikasi jika diperlukan terjadi perubahan kondisi.

### **2.1.7 Unsur – unsur Pengendalian Internal**

Menurut Mulyadi (2017:130)<sup>[11]</sup> unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

## **2.2 Konsep Pelaksanaan**

Dalam kamus besar bahasa indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan juga diartikan sebagai suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap selesai. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.(Nurdin Usman, 2002:70)<sup>[4]</sup>

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme dalam suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam tulisan ini yang menjadi fokus pelaksanaannya adalah program, jadi definisi program dapat dilihat dari paparan Joan L. Herman (dalam Widya Astuti, 2013:9) adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan mendatangkan hasil atau pengaruh. Untuk mempertegas definisi diatas, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh kebijaksanaan, prosedur dan sumber daya yang dimaksudkan untuk membawa suatu hasil dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

## **2.3 Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)**

### **2.3.1 Definisi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TI)**

Pemakai Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN, berdasarkan alas hak yang sah maupun tanpa berdasarkan alas hak yang sah.

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN (instalasi ketenaga listirkan milik PLN sampai dengan dan/atau Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN.

Hal-hal yang berhubungan dengan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) diantaranya:



1. Alas hak yang sah adalah hubungan hukum keperdataan berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya dengan PLN.
2. Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk membatasi daya listrik yang digunakan pelanggan sesuai dengan SPJBTL antara PLN dengan pelanggan.
3. Alat Pengukur adalah alat milik PLN berupa peralatan elektro mekanik maupun elektronik untuk mengukur energi listrik yang dipakai.
4. Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disebut APP adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik, baik sistem Prabayar maupun Paskabayar.
5. Daya Tersambung adalah daya yang disepakati antara PLN dengan Pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
6. Daya Kedapatan adalah daya yang dihitung secara proposional dan profesional berdasarkan alat pembatas atau kemampuan hantar arus suatu penghantar yang dipergunakan oleh pemakai tenaga listrik yang kedapatan pada waktu dilaksanakan P2TL.
7. Instalasi Ketenaga Listrikan yang selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konvensi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.

8. Instalasi PLN adalah Instalasi tenaga listrikan milik PLN sampai dengan Alat Pembatas atau Alat Pengukur APP.
9. Instalasi Pelanggan adalah Instalasi tenaga listrikan milik Pelanggan sesudah Alat Pembatas Alat Pengukur atau APP.
10. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut JTL adalah sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi, atau Tegangan Ekstra Tinggi.

P2TL merupakan langkah positif PT PLN (Persero) dalam menertibkan dan mengamankan energi listrik yang dimanfaatkan masyarakat (pelanggan maupun non pelanggan) secara tidak sah (illegal). P2TL dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, dan untuk menekan susut.

Pelanggaran pemakaian tenaga listrik adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan atau bukan pelanggan terhadap Instalasi dan atau Alat Pengukur dan Pembatas (APP) milik PLN dengan maksud untuk mempengaruhi pembatas daya, mempengaruhi pengukuran, mempengaruhi pembatas daya dan pengukuran, serta memakai listrik tanpa alas hukum yang sah (untuk bukan pelanggan).

Pelanggan yang melakukan Pelanggaran dikenakan sanksi berupa :

1. Pemutusan Sementara
2. Pembongkaran Rampung

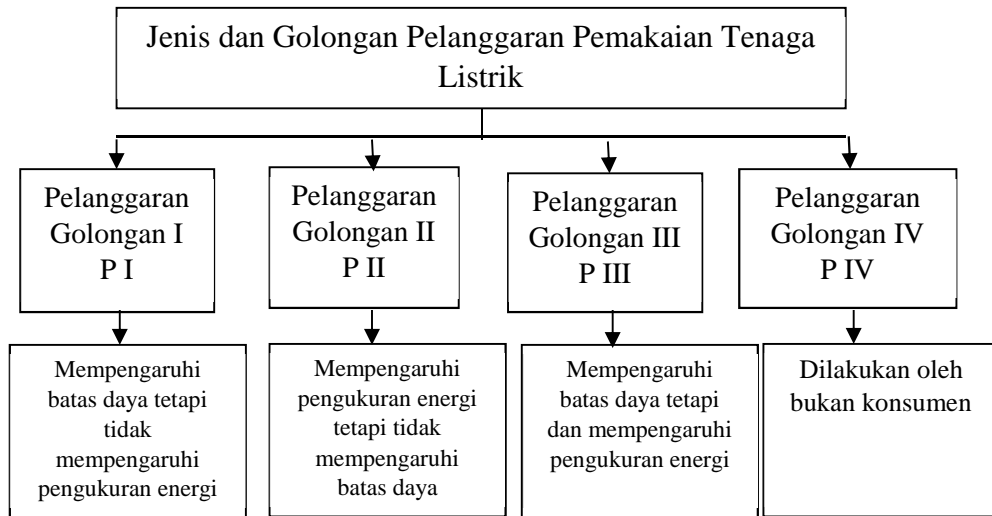
3. Pembayaran Tagihan Susulan
4. Pembayaran Biaya P2TL Lainnya meliputi bea materai, biaya penyegelan kembali, biaya penggantian material dan pemasangan atas STL dan/atau APP dan/atau perlengkapan APP yang harus diganti serta biaya pajak penerangan jalan (PPJ) dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa :

1. Pembongkaran Rampung.
2. Pembayaran TS4.
3. Pembayaran Biaya P2TL lainnya

Proses penyelesaian perkara pelanggaran pelanggan adalah pelanggan diberi berita acara hasil pemeriksaan serta dimintai tanda tangan dalam berita acara bahwasanya telah terjadi pemeriksaan di rumah pelanggan. Selanjutnya pelanggan diminta untuk datang memenuhi panggilan, setelah sampai di kantor PLN setempat pelanggan diberi pengarahan atau penjelasan tentang ketentuan P2TL serta sanksi yang diperoleh pelanggan ketika melakukan pelanggaran. Dan pelanggan diminta untuk melunasi administrasi/denda yang telah ditetapkan.

### 2.3.2 Jenis dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik



Gambar 2.1 Jenis dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik

#### 1. Pelanggaran golongan I (P I)

Termasuk P I yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya, sebagai berikut :

- a. Segel milik PLN pada Alat Pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
- b. Alat Pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
- c. Kemampuan Alat Pembatas menjadi lebih besar, yang diantaranya dengan:
  - 1) Seting relay Alat Pembatas kondisinya berubah.
  - 2) Penghantar phasa dengan netral pada sambungan 1 phasa kondisinya tertukar.

- d. Alat Pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar.
- e. Khusus untuk Pelanggan yang menggunakan meter kVA maks.
  - 1) Segel pada meter kVA maks dan/atau perlengkapannya, hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.
  - 2) Meter kVA maks dan/atau perlengkapannya, rusak, hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
- f. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.

## 2. Pelanggaran Golongan II (P II)

Termasuk P II yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut :

- a. Segel Teradan/atauSegelmilik PLN pada Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya;
- b. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;
- c. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik. Adapun cara-cara mempengaruhi alat pengukur dan/atau perlengkapannya antara lain:
  - 1) Mempengaruhi kerja piringan alat pengukur antara lain dengan :
    - a) Membengkokkan piringan meter

- b) Membengkokkan poros piringan meter
  - c) Mengubah kedudukan poros piringan
  - d) Melubangi tutup meter
  - e) Merusakkan sekat tutup meter
  - f) Merusakkan kaca tutup meter
  - g) Mengganjal piringan agar berhenti atau lambat.
- 2) Mempengaruhi kerja elektro dinamik, antara lain dengan :
- a) Mengubah setting kalibrasi alat pengukur
  - b) Memutus/merusak /mempengaruhi kerja kumparan arus
  - c) Memutus/merusak /mempengaruhi kerja kumparan tegangan
  - d) Memutus penghantar neutral dan menghubungkan ke bumi.
- 3) Mempengaruhi kerja register/angka register antara lain dengan :
- a) Mengubah gigi transmisi
  - b) Merusak gigi transmisi
  - c) Mempengaruhi posisi WBP
  - d) Memundurkan angka register
- 4) Pengawatan meter berubah dan ada indikasi kesengajaan yang dibuktikan melalui laboratorium independen atau laboratorium PLN sehingga :
- 5) Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi dengan :
- 6) Mengubah instalasi pentahanan netral CT dan kontak APP yang mengakibatkan pengukuran energi tidak normal.

- 7) Memutus penghantar netral pada sambungan instalasi milik PLN dan netral di sisi instalasi milik pelanggan serta menghubungkan penghantar netral ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran energi.
- 8) Menukar penghantar fasa dengan pengantar netral pada instalasi milik PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi.
- 9) Mengubah/memindah instalasi milik PLN tanpa ijin PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapannya milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja alat pengukur.
- 10) Mengubah pengukur alat pengukur elektronik, antara lain dengan:
  - a) Mengubah setting data entry.
  - b) Mempengaruhi sistem komunikasi data dari meter elektronik ke pusat control data PLN.
  - c) Mempengaruhi perangkat lunak yang dipakai untuk fungsikerja alat pengukur.

### 3. Pelanggaran Golongan III (P III)

Termasuk P III yaitu apabila pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan energi sebagai berikut :

- a. Melakukan Pelanggaran yang merupakan gabungan pada P I dan P II;
- b. Melakukan Sambungan Langsung ke Instalasi Pelanggan dari Instalasi PLN sebelum APP.

### 4. Pelanggaran Golongan IV (P IV)

Termasuk P IV yaitu apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh Bukan Pelanggan. Yang termasuk pelanggaran P IV antara lain adalah :

- a. Menyambung langsung dari Jaringan Tenaga Listrik (JTL) ke IMP;
- b. Pelanggan yang sudah tidak sesuai antara Identitas Pelanggan (IDPel) dengan kode kedudukan (koduk) akibat APP dipindahkan tanpa ijin PLN;
- c. Pemakai tenaga listrik tidak terdaftar di dalam Data Induk Langganan (DIL) PLN;
- d. Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P III;
- e. Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P IV.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur ini, adapun penelitian terdahulu tentang Analisis Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sudah dilakukan, di antaranya adalah penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN) “ JUDUL PENELITIAN “	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Sari, 2018 <sup>[13]</sup> . “Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah	menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian internal akuntansi yang dilakukan



	<p>Akuntansi Atas Jaringan Distribusi Listrik Oleh PT PLN(Persero).”</p> <p><i>Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 4 No. 2, November 2018.</i></p>	metode deskriptif kualitatif	<p>oleh bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara telah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan GM. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatanhambatan lain yang menyebabkan pengendalian internal tidak terlihat mendorong kinerja bidang distribusi PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara.</p>
2	<p>Christiane, Yance &amp; Frida (2020)<sup>[14]</sup>.</p> <p>“ Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang (Studi Pada PT PLN (Persero) Rayon Tondano).”</p> <p><i>Open Journal Sstems, Vol 5. N.2 2020</i></p>	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif dengan pendekatan eksploratif.	<p>Berdasarkan anlisis peneliti dapat disimpulkan bahwa PT. PLN (Persero) Rayon Tondano. Dalam menggunakan sistem pengendalian piutang sudah sesuai dengan prinsip pengendalian internal COSO, Committee Of Sponsoring Organizations, Penerapan Pengendalian internal piutang berupa sistem yakni EIS dan program P2TL yang merupakan informasi dan komunikasi telah sesuai dan juga telah dilaksanakan sebagai mana mestinya dengan peraturan kebijakan pemerintah yaitu pelayanan publik.</p>
3	<p>Ira (2019)<sup>[15]</sup>.</p> <p>“Efektivitas Whistleblowing System dalam Pendeksian Kecurangan dan Pencegahan Kecurangan dalam Kerangka COSO Pengendalian Internal”</p>	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif.	<p>Berdasarkan hasil penelitian kualitatif menunjukan bahwa Efektivitas whistleblowing system dalam pendeteksian kecurangan di PT PLN (Persero), berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa whistleblowing systemdi PT PLN (Persero) dalam pendeteksian kecurangan masih belum efektif, hal ini sesuai dengan hasil deskriptif yang masih ada indikator pendeteksian kecurangan dalam kondisi cukup ddibandingkan dengan Efektivitas whistleblowing system dalam pencegahan kecurangan yang dalam kondisi sudah baik.</p>

4	<p>Nova Andriani (2018)<sup>[16]</sup>.</p> <p>“Analisis Pelaksanaan Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Rayon Duri.”</p> <p><i>Jurnal Ilmiah KOMPUTASI, Vol. 18 No : 2, Juni 2018.</i></p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pengamatan atau observasi.</p>	<p>Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan program penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) di PT PLN (Persero) Rayon Duri sudah berjalan dengan Baik.</p>
5	<p>Iswandi (2019)<sup>[17]</sup>.</p> <p>“Evaluasi Penerapan <i>Internal Control</i> dan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.</p> <p><i>Binus Businesss Review Vol. 2 No. 2 November 2011: 825-832</i></p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pengamatan atau observasi.</p>	<p>Dari evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa lima komponen <i>Internal Control</i> yang ditetapkan COSO telah diimplementasikan namun salah satu komponen <i>Internal Control</i> yaitu aktivitas pengendalian belum sesuai pelaksanaannya dengan kriteria yang ditetapkan COSO. Sedangkan pelaksanaan GCG telah dilaksanakan dengan baik.</p>

Sumber : Data Diolah 2021

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor PLN (Persero) ULP Tegal Timur, beralamat di Jl. Raya Dampyak No.1A, Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52181.

#### **3.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

#### **3.3 Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2016: 11)<sup>[18]</sup> jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

#### **3.4 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)<sup>[19]</sup> adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara dan observasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)<sup>[19]</sup> adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti laporan – laporan, studi kepustakaan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber yang terpercaya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara

langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (dalam Mutiarani et al., 2019)<sup>[18]</sup> menyatakan bahwa, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang digunakan penelitian ini meliputi proses pelaksanaan P2TL dan barang bukti P2TL pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur.

### 4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain (Setiawan, 2021)[16].

## **3.6 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis deskriptif kualitatif yaitu dimana penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan data apa adanya, serta menjelaskan data mengenai informasi bagaimana pengendalian internal atas pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa gambaran umum perusahaan serta hasil observasi,

wawancara dan studi pustaka mengenai pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur. Proses analisis pada penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi berkaitan dengan pengendalian internal pada pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang diterapkan PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur.
2. Mempelajari data yang diperoleh dari objek penelitian.
3. Menganalisis keseluruhan data-data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi mengenai pengendalian internal pada pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur, kemudian membandingkannya dengan komponen COSO (Committee Of Sponsoring Organizations) , untuk mengetahui apakah pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur sudah sesuai atau baik.
4. Memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengendalian internal pada pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur yang sudah dianalisis dengan komponen COSO (Committee Of Sponsoring Organizations).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur**

##### **4.1.1 Sejarah PT PLN (Persero)**

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Sedangkan Kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tegal Timur berdiri pada tanggal 6 November 2001, yang beralamat di Jl. Raya Dampyak No.1A Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Pada awal berdiri Kantor ULP Tegal Timur bernama Rayon Tegal Timur, pada bulan Maret 2019 Kantor Rayon Tegal Timur dirubah menjadi Kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tegal Timur.

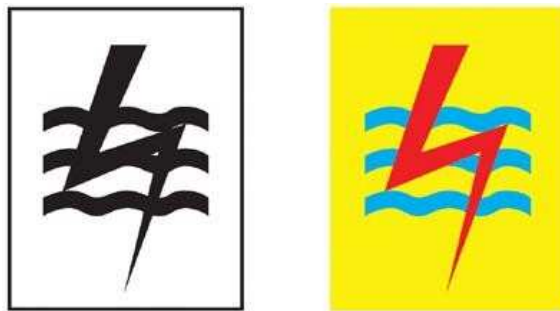


#### 4.1.2 Logo PT PLN (Persero)

Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1

Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. : 031/DIR/76 Tanggal : 1

Gambar 4.1. Logo PLN



Sumber : Internal Perusahaan, 2021

##### 1. Bidang Persegi Panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

Gambar 4.2. Bidang Persegi Panjang



Sumber : Internal Perusahaan, 2021

## 2. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perkembangan jaman.

Gambar 4.3. Petir atau Kilat



Sumber : Internal Perusahaan, 2021

## 3. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan,

penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

Gambar 4.4 Tiga Gelombang



Sumber : Internal Perusahaan, 2021

#### **4.1.3 Maksud dan Tujuan PT PLN (Persero)**

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

#### **4.1.4 Job Description**

*Job description* merupakan rincian atau gambaran mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam perusahaan. Berikut job description pada PT PLN (Persero) Distribusi Jatim Area Malang Rayon Kota yang berisi tujuan

utama jabatan, tanggungjawab utama serta wewenang dari beberapa tingkatan jabatan:

1. Manajer ULP

Mengkoordinasikan pengelolaan pendistribusian dan keandalan tenaga listrik, pelayanan penjualan tenaga listrik dengan menjalankan secara tertib Administrasi Umum dan Administrasi Teknik unruk mencapai target kerja.

2. SPV Transaksi Energi

Supervisor Transaksi Energi Listrik Mengkoordinasikan kegiatan pembacaan meter (Fungsi II), pembuatan rekening (Fungsi III), Pemasangan, Pengoperasian, dan Pengendalian Alat Pembatas Pengukuran (APP-Mekanik), Proteksi Pelanggan/jaringan Distribusi, Automatic Meter Reading (AMR), untuk memenuhi standar operasional

3. Junior Engineer Pengendalian Susut dan PJU

Melaksanakan pengelolaan kegiatan penekanan susut energi dari sisi teknis maupun non teknis untuk peningkatan efisiensi jaringan distribusi dan memperoleh kWh yang diselamatkan.

4. Junior Officer Pembacaan meter dan Pembuatan Rekening

Memonitor mutu kualitas pelaksanaan pembacaan meter sesuai kaidah Fungsi II, memastikan proses perhitungan tagihan listrik yang akurat dan tetap waktu sesuai kaidah Fungsi III, melaksanakan aplikasi proses penagihan rekening legalisasi/ pembayaran terpusat sesuai kaidah Fungsi V

untuk meningkatkan penjualan, pengendalian piutang dan kepuasan pelanggan.

## **4.2 Hasil Analisis Data**

### **4.2.1 Pengendalian Internal atas Pelaksanaan P2TL di PT PLN (Persero)**

#### **ULP Tegal Timur**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dispesifikasikan dengan menggunakan komponen pengendalian internal menurut teori dari COSO. Terdapat lima komponen COSO untuk menilai sesuai tidaknya pelaksanaan P2TL PT.PLN (Persero) ULP Tegal Timur , antara lain :

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

##### **a. Integritas dan Nilai Etika**

Integritas dan nilai etika yang dilaksanakan TIM P2TL pada PT.PLN (Persero) ULP Tegal Timur menetapkan peraturan-peraturan dengan menjalankan SOP (Standard Operating Procedure) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu :

##### **1) Tahap Pra Pemeriksaan,**

merupakan kegiatan tahap persiapan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya P2TL.

Langkah-langkah yang harus dilakukan pada Tahap Pra P2TL, adalah :

##### **a) Menentukan Target Operasi (TO) P2TL**

##### **b) Menyusun jadwal pelaksanaan.**

- c) Melakukan Koordinasi dengan Penyidik
- d) Melakukan Koordinasi lapangan dengan pihak terkait.
- e) Menyiapkan Perlengkapan P2TL yang berkaitan dengan pelaksanaan P2TL di lapangan.

## 2) Tahap Pemeriksaan

merupakan kegiatan tahap pelaksanaan P2TL di lapangan

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL pada Tahap Pelaksanaan P2TL, adalah:

- a) Memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik dan melakukan pengamanan lokasi.
- b) Sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekati APP sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi, untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan.
- c) Melakukan pemeriksaan lapangan.
- d) Melakukan tindakan P2TL bagi Pemakai Tenaga Listrik.
- e) Melakukan pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL
- f) Meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik
- g) Menyerahkan dokumen dan barang bukti kepada Petugas Administrasi P2TL dengan membuat berita acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL

## 3) Tahap Pasca Pemeriksaan

merupakan kegiatan tahap tindak lanjut hasil temuan P2TL.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Petugas Administrasi P2TL pada Tahap Pasca P2TL, adalah :

- a) Menerima dokumen dan barang bukti hasil pemeriksaan lapangan P2TL.
- b) Menerima dan/atau membuat surat panggilan kepada Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dalam rangka tindak lanjut hasil temuan P2TL.
- c) Melakukan pemeriksaan administrasi dan laboratorium hasil temuan P2TL.
- d) Membuat analisa dan perhitungan serta usulan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan P2TL.
- e) Melaksanakan penetapan tindak lanjut hasil temuan P2TL sesuai penetapan Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL.
- f) Menyiapkan administrasi proses tindak lanjut hasil temuan P2TL.

Membuat laporan penyelesaian kasus P2TL.

b. Komitmen terhadap kompetisi

PT PLN (Persero) menetapkan kriteria-kriteria tertentu dalam merekrut karyawan baru dengan tujuan untuk mendapat karyawan yang ahli sesuai dengan bidangnya dan memiliki kemampuan dan performa yang bagus agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Pihak perusahaan melaksanakan training atau pelatihan serta mewajibkan untuk setiap petugas pelaksana P2TL memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga

sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.

c. Slogan Manajemen dan Gaya Operasi

PT PLN (Persero) mempunyai slogan yaitu : “PLN Satu Tujuan, Andal, Terbaik” slogan PLN Terbaik dijadikan modal kuat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tentu tidak hanya sebatas slogan atau jargon, kata ter yang dipadukan kata sifat baik dengan arti paling baik, tentu tidak mudah untuk diimplementasikan. Perlu dukungan semua pihak. Internal dibangun konsep moral superteam dan eksternal seluruh stakeholder mendukung kebijakan PLN. Untuk Gaya Operasi setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TL dalam rangka menertibkan peyaluran Tenaga Listrik untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menekan susut.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi disusun secara fungsional yaitu struktur organisasi yang disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh TIM P2TL pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur. Penyusunan struktur organisasi berdasarkan fungsi ini terdapat pembagian sesuai pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam bentuk Job Description sehingga menciptakan pengendalian yang baik. Berikut struktur organisasi P2TL:

1) Penanggung Jawab P2TL

Penanggung jawab P2TL adalah pejabat PLN yang ditunjuk oleh



pemberi tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan P2TL yang dapat merupakan pejabat struktural maupun fungsional yaitu Manajer ULP.

## 2) Pelaksana Lapangan P2TL

Petugas pelaksana Lapangan P2TL merupakan regu yang terdiri dari pejabat/petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan P2TL dilapangan diantaranya SPV transaksi energi dan Junior Engineer Pengendalian Susut dan PJU.

## 3) Pelaksana Administrasi

Petugas Administrasi P2TL adalah pejabat/petugas-petugas PLN yang menyelesaikan administrasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan P2TL dilapangan, diantaranya SPV pelayanan pelanggan dan administrasi.

### e. Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia

Kebijakan dan praktek sumber daya manusia di PT PLN (Persero) memiliki Divisi HRD untuk mengurus tentang perekrutan karyawan baru, Dalam perekrutan karyawan baru PT PLN (Persero) menerapkan kebijakan perekrutan dengan syarat-syarat yaitu : Pria atau Wanita usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, D3, S1. Tinggi badan untuk pria minimal 165cm dan untuk wanita minimal 155cm, berpenampilan menarik dan komunikatif, sehat jasmani dan rohani, tidak bertato, tidak bertindik, dan tidak buta warna. Untuk

karyawan yang memiliki kinerja bagus akan ada jenjang karir.

## **2. Penilaian Resiko**

Resiko penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) terhadap pengendalian internal terkait dengan pelaksanaan P2TL yaitu:

- a. Terjadinya kecelakaan kerja yang dialami petugas P2TL saat pemeriksaan lapangan sehingga PLN ULP Tegal Timur menyediakan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) serta kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- b. Keterbatasan jumlah petugas pelaksana lapangan P2TL, maka pada TIM P2TL PLN ULP Tegal Timur untuk pelaksanaan P2TL dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, yang memiliki sertifikat pelatihan P2TL dari lembaga sertifikasi kompetensi independen yang terakreditasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) Ketua regu petugas Pelaksana Lapangan P2TL harus dari pegawai PLN
  - 2) Tanggung jawab pelaksanaan P2TL sepenuhnya pada PLN.
  - 3) Dokumen P2TL ditandatangani oleh ketua regu Petugas Pelaksana Lapangan P2TL.
- c. Terjadinya penyimpangan perilaku oleh petugas pelaksana P2TL saat bertugas di lapangan, sehingga PLN ULP Tegal Timur melakukan pengendalian secara preventif berupa sosialisasi, himbauan dan

penunjukan ketua regu petugas pelaksana P2TL untuk mengawasi dan memastikan dalam tahap pemeriksaan dilapangan oleh petugas pelaksana lapangan P2TL sudah sesuai dengan SOP, serta menanamkan nilai-nilai integritas, kemudian pengendalian secara Korektip bila telah terjadi penyimpangan maka akan diberlakukan berupa pemberian hukuman, sanksi dan nasehat atau penyuluhan kepada petugas P2TL.

### **3. Aktifitas Pengendalian**

- a. Pemisahan tugas yang memadai
  - 1) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan P2TL dilakukan oleh Penanggung Jawab P2TL atau Manajer ULP.
  - 2) Proses Pemeriksaan pelanggan dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL
  - 3) Menerima dokumen, barang bukti dan tindak lanjut hasil pemeriksaan P2TL dilakukan oleh Petugas Pelaksana administrasi.
- b. Otorisasi yang tepat atas Transaksi dan Aktivitas
  - 1) Pada aktivitas menetapkan besar dan cara pembayaran TagihanSusulan diotorisasi oleh Penanggung Jawab P2TL.
  - 2) Pada aktivitas pemutusan sementara, melakukan pembongkaran rampung serta melakukan pengambilan barang bukti APP atau peralatan lainnya diotorisasi oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL.

3) Menerima dan atau membuat surat panggilan kepada pelanggan P2TL dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lainnya diotorisasi oleh Petugas Pelaksana Administrasi.

c. Dokumen dan catatan yang memadai

TIM P2TL PLN ULP Tegal Timur telah membuat dokumen-dokumen dan catatan-catatan sudah memadai bertujuan untuk pengawasan tindak lanjut penyelesaian P2TL ,misalnya berita acara pemeriksaan P2TL , mencatat serta memonitoring hasil temuan pemeriksaan P2TL diotorisasi oleh pihak yang berwenang.

d. Pengendalian Fisik atas Aset dan Catatan-catatan

Pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan yaitu faktor penting dalam pengelolaan perlengkapan P2TL dan persediaan material APP. Pemeriksaan fisik biasanya diadakan checklist setiap pagi perlengkapan dan peralatan yang di butuhkan sebelum berangkat ke lokasi Target Operasi. Pengawasan fisik atas asset dilakukan oleh penanggung jawab P2TL

e. Pengecekan terhadap Pekerja secara Independen

Pengecekan independen di TIM P2TL PLN ULP Tegal Timur dilakukan oleh penanggung jawab P2TL atau Manajer ULP untuk mengetahui pelaksanaan P2TL yang dilaksanakan di wilayah ULP Tegal Timur dan untuk mengetahui kinerja petugas P2TL terhadap tugasnya apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh P2TL PLN ULP Tegal Timur dalam pelaksanaan tahap pra pemeriksaan, tahap pemeriksaan dan tahap pasca pemeriksaan P2TL sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan P2TL yang menggunakan beberapa dokumen dan catatan yang diperlukan dalam pelaksanaan P2TL PLN ULP Tegal Timur. P2TL PLN ULP Tegal Timur juga memiliki database di komputer yang berisi semua informasi P2TL PLN ULP Tegal Timur.

## **5. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan untuk menilai kualitas pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan pada P2TL PLN ULP Tegal Timur Tegal. Proses pengawasan pada P2TL PLN ULP Tegal Timur Tegal biasa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) PLN dengan berjalan memantau dan mengawasi secara langsung apakah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Setiap setahun sekali juga diadakan audit untuk menghindari kecurangan dan penyimpangan yang tidak diinginkan. Misalkan ada perilaku dari petugas P2TL yang tidak bertanggung jawab dan ditemukan kondisi yang tidak aman bagi petugas P2TL karena APD yang tidak memadai. Hal tersebut perlu di tindak lanjuti oleh manajemen. Penanggung jawab P2TL harus selalu mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan P2TL dengan diadakanya sharing P2TL setiap minggu sekali dalam rangka menjaga dan memperlancar pelaksanaan P2TL PLN ULP Tegal Timur.

### 4.3 Pembahasan

Analisis pengendalian internal atas pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dalam penelitian ini menggunakan model Committee of Sponsoring Organizations (COSO), yaitu mengidentifikasi setidaknya-tidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Adapun lima komponen untuk menganalisis pengendalian internal atas persediaan barang dagang di Toko Sembako Ibu “Ida” Brebes dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.1 Perbandingan Komponen Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan P2TL pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur Berdasarkan Komponen COSO.**

No	Komponen	P2TL PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur	Menurut COSO teori Arens (Kalendesang et al., 2017) <sup>[2]</sup>	Ket.
1	<b>Lingkungan Pengendalian</b>			
a	Integritas dan Nilai Etika	Integritas dan Nilai Etika berbentuk penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TL, peraturan yang ditetapkan oleh PLN Tegal Timur dan di komukasikan kepada setiap petugas P2TL serta Memberikan sanksi kepada petugas yang melanggar.	Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap integritas dan Nilai Etika dengan memberikan standar perilaku dalam pelayanan konsumen, mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan dan mengevaluasi kinerja karyawan serta menindaklanjuti pelanggaran secara tepat.	Sesuai
b	Komitmen terhadap Kompetensi	Komitmen terhadap Kompetensi perusahaan dengan menetapkan kriteria dalam perekrutan karyawan	Komitmen terhadap Kompetensi mencakup pertimbangan manajemen mengenai	Sesuai

		baru dan manajemen memberikan training serta uji kompetensi di bidang P2TL kepada karyawan baru.	pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dan bauran dari pelatihan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut.	
c	Partisipasi Dewan Direksi dan Komisaris atau Komite Audit	Dalam pelaksanaa P2TL PLN ULP Tegal Timur terdapat partisipasi dari Dewan Direksi dalam bentuk Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang P2TL dan komite audit yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI) P2TL untuk berperan dalam pengawasan pengembangan dan aktifitas pengendalian dalam pelaksanaan P2TL apakah sudah layak.	Partisipasi Dewan Direksi dan Komisaris atau Komite Audit berperan penting dalam pengawasan pengembangan dan aktifitas pengendalian dalam sebuah perusahaan karena memikul tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa manajeme telah menjalankan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang layak.	Sesuai
d	Slogan Manajemen dan Gaya Operasi	Slogan PLN yaitu PLN Terbaik, Gaya Operasi pelaksanaa P2TL PLN ULP Tegal Timur seluruh keputusan dan kebijakan berada pada penanggung jawab P2TL atau Manajer ULP.	Slogan Manajemen dan Gaya Operasi semua keputusan berada pada pimpinan manajemen tertinggi bertanggung jawab mencapai tujuan perusahaan	Sesuai
e	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi P2TL disusun secara fungsional sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban petugas P2TL yang tercantum secara resmi pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) nomor 888-Z.P/DIR/2016 Tentang P2TL.	Struktur Organisasi perusahaan membentuk struktur organisasi dalam menentukan garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada agar lebih fokus dan terarah.	Sesuai
f	Kebijakan dan Praktik	Perusahaan telah menerapkan kebijakan	Kebijakan dan Praktik Sumber Daya	sesuai

	Sumber Daya Manusia	perekrutan dengan syarat-syarat tertentu dan perusahaan memberikan jenjang karir terhadap pegawai yang memiliki kinerja yang bagus.	Manusia aspek paling penting dari pengendalian internal adalah personil dengan memberikan kebijakan perekrutan, pelatihan dan mempromosikan pegawai yang mempunyai kinerja yang baik	
2	<b>Penilaian Resiko</b>	Penilaian Resiko dalam pelaksanaan P2TL, sudah dilakukan oleh Manajemen PLN ULP Tegal Timur baik dalam analisis resiko dan cara pengendaliannya untuk tercapainya tujuan pelaksanaan P2TL.	Penilaian Resiko kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya.	Sesuai
3	<b>Aktifitas Pengendalian</b>			
a	Pemisah Tugas yang memadai	Pemisahan tugas yang memadai dalam pemisahan tanggung jawab terhadap pelaksanaan P2TL sudah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan dari setiap petugas P2TL.namun	Pemisahan tugas yang memadai mempunyai 4 pedoman umum dalam pemisahan tugas yaitu pemisahan pemegang persediaan, pemisahan otorisasi transaksi, pemisahan tanggung jawab operasional pencatatan.	Sesuai
b	Otorisasi yang tepat atau transaksi dan aktivitas	Otorisasi yang tepat atas pelaksanaan P2TL dan aktivitas langsung oleh pimpinan manajemen sesuai dengan kewenangannya, namun dilapangan masih ada kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku oleh petugas pelaksana lapangan P2TL yang biasanya berhubungan langsung dengan pelanggan dalam kasus	Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, manajemen menyusun otorisasi umum bagi perusahaan untuk ditaati oleh karyawan. Kebijakan otorisasi harus dibuat oleh pimpinan manajemen	sesuai



		pelanggan melakukan pelanggaran dan untuk menghindari sanksi P2TL, pelanggan membujuk petugas P2TL melalui jalur damai		
c	Dokumen dan catatan yang memadai	Dokumen dan catatan yang memadai seperti berita acara pemeriksaan p2tl, berita acara pengambilan barang bukti , catatan perolehan hasil dari pemeriksaan P2TL setiap harinya dalam betuk monitoring.	Dokumen dan catatan yang memadai meliputi berbagai item seperti membentuk catatan penjualan, pesanan pembelian bukti terjadinya transaksi.	Sesuai
d	Pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan	Pengendalian fisik atas aset dilakukan oleh Penanggung Jawab P2TL setiap hari sebelum petugas P2TL berangkat ke lokasi target operasi . dan catatan-catatan P2TL berupa berita acara tersimpan secara tersusun rapih.	Pengendalian fisik atas aset dan catatan -catatan manajemen dengan memantau persediaan dan catatan-catatan penting yang dilakukan oleh pihak berwenang .	sesuai
e	Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen	Pengecekan terhadap pelaksanaan P2TL secara independen dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) P2TL untuk mengetahui setiap aktivitas. Apabila petugas P2TL melakukan kesalahan atau kinerja tidak baik akan diberikan himbauan dan sanksi.	Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen, kategori terakhir dari aktivitas pengendalian adalah review yang cermat dan berkelanjutan atas keempat hal lainnya. kebutuhan pengecekan independen meningkat apabila struktur pengendalian intern mengalami perubahan jika tidak terdapat mekanisme penelaahan yang sering.	
4	<b>Informasi dan</b>	Informasi dan Komunikasi perusahaan memiliki database untuk	Informasi dan Komunikasi dengan	Sesuai

	<b>Komunikasi</b>	informasi perusahaan dan persediaan.	mengkomunikasikan informasi dan tanggung jawab mendukung fungsi pengendalian internal	
5	<b>Pengawasan</b>	Pengawasan biasa dilakukan oleh mananjer ULP atau penanggung jawab P2TL dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) P2TL memantau dan mengawasi secara langsung dan Setiap Setahun sekali.	Pengawasan berkaitan dengan penilaian mutu pengendalian secara berkelanjutan oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan.	sesuai

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Pengendalian Internal atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur berdasarkan 5 (lima) Komponen COSO (Committee Of Sponsoring Organizations), untuk Komponen Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Komponen Penawasan sudah sesuai atau sudah efektif. Namun dalam komponen penilaian resiko masih terdapat kemungkinan terjadi penyimpangan perilaku oleh petugas P2TL ketika ketua regu petugas P2TL ketika tidak ikut serta dalam pemeriksaan P2TL. sehingga petugas pelaksana lapangan P2TL perlu menjunjung tinggi integritas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan komponen COSO sistem pengendalian internal atas pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur secara keseluruhan sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Namun, dari kelima komponen pengendalian internal yang sudah di terangkan pada hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Aktifitas Pengendalian masih ada kemungkinan terjadinya penyimpangan perilaku oleh petugas pelaksana lapangan P2TL yang biasanya berhubungan langsung dengan pelanggan dalam kasus pelanggan melakukan pelanggaran dan untuk menghindari sanksi P2TL, pelanggan membujuk petugas P2TL melalui jalur damai. Maka, dalam hal ini perlu peran yang konsisten dari penanggung jawab P2TL untuk mengkoordinir dan mengawasi setiap pelaksanaan P2TL.

#### **1.2 Saran**

Demi tercapainya pengendalian internal atas pelaksanaan program penertiban pemakaian tenaga listrik di PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur yang lebih baik lagi, penulis memberikan saran untuk penanggung jawab P2TL memperketat pengawasan P2TL dengan cara menghimbau serta melakukan pembinaan kepada petugas pelaksana lapangan P2TL agar taat dan

menjungjung tinggi nilai tanggung jawab yang telah di berikan serta mengingatkan setiap penyimpangan yang dilakukan petugas P2TL akan ada sanksi yang dikenakan. Untuk petugas pelaksana lapangan agar selalu menjaga kode etik profesi, tanggung jawab dan integritas, Serta Pelaksana Administrasi P2TL lebih teliti dalam meninjau laporan tagihan pemakai tenaga listrik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Siagian, Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara.
- [2] Abdullah, Mikrajuddin. 2007. Catatan Kuliah : *Fisika Dasar 1*. Bandung: Institute Teknologi Bandung.
- [3] PT PLN (Persero) (2016). Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/D/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Jakarta: PT PLN (Persero) Pusat.
- [4] Sujarweni, V. Wiratna. (2016). Pengantar Akuntansi. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- [5] TIMBooks. (2015). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta.
- [6] Effendi, Muh. Arief. (2016). The Power of Good Corporate Governance. Salemba Empat. Jakarta.
- [7] Hery. (2016). *Akuntansi Dasar 1 & 2*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- [8] Rusdiono. (2021). Pengendalian Internal: Pengertian, Tujuan, dan Komponennya. 12 April 2021.  
<https://www.rusdionoconsulting.com/pengendalian-internal-perusahaan/>
- [9] Ma'ruf. (2020). √ Sistem Pengendalian Internal: Pengertian, Tujuan dan Contoh. 9 Sempember 2020.  
<https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/tujuan-unsur-dan-pengertian-sistem-pengendalian-intern/>
- [10] Kalendesang, A. K., Lambey, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Pada Supermarket Paragon Mart Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 131–139. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17443.2017>
- [11] Mulyadi. (2017). Sistem Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta.
- [12] Usman, Nurdin & Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- [13] Desmira, Didik & Rini, 2018. Analisis Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Pada Pelanggan Tegangan Menengah (20 KV) Di PT. PLN (Persero) Distribusi Banten Area Cikupa. *Jurnal PROSISKO*, Vol. 5 No. 2, September 2018.
- [14] Safirotul & Siti, 2017. Analisis Atas Perhitungan Denda Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Serta Pengakuannya dalam Finacial Statement Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang Rayon Kota. *Jurnal Administrasi Bisnis, (JAB)*/Vol. 51 No. 1 Oktober 2017.
- [15] Karina, 2017. Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Di Kota Semarang.

- [16] Nova Andriani, 2018. Analisis Pelaksanaan Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pada PT. PLN (Persero) Rayon Duri .
- [17] Iswandi. 2020. Evaluasi Penerapan Internal Control dan Pelaksanaan Good Corporate Governace pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. *Binus Business Reviewm Vol. 2, No. 2 November, 2020.*
- [18] Sugiyono, 2008. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.
- [19] Suliyanto, 2005. Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran, Bogor: Ghalia Indonesia.

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Bapak Usman (Selaku Junior Engineer Pengendalian Susut dan PJU)

Hari/Tanggal : Jumat, 2 Juli 2021

No.	Persoalan Penelitian	Pertanyaan	Jawaban
1	<b>Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PLN ULP Tegal Timur</b>		
	Standar Operasional Prosedur P2TL	“Untuk Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik/P2TL di PLN ULP Tegal Timur, apakah ada SOP nya?”	“Ada mas, berdasarkan peraturan Direksi PT PLN {Persero) nomor 088-Z.P/DIR tahun 2016, SOP pelaksanaan P2TL ada tiga tahap.”
		“Bisa disebutkan tahapanya apa saja Pak ?”	“Tahapanya yang pertama tahap pra pemeriksaan, yang kedua tahap pemeriksaan, dan yang ketiga tahap pasca pemeriksaan.”
	a. Tahap Pra Pemeriksaan P2TL	“dalam tahap pra pemeriksaan itu petugas P2TL melakukan apa saja?”	“Untuk tahap pra pemeriksaan P2TL kegiatan seperti, penanggung jawab P2TL menyiapkan dan menjaga kerahasiaan target operasi/TO.”
		“untuk menjaga kerahasiaan target operasi/TO dengan cara bagaimana pak?”	“dengan cara kami menyerahkan TO tersebut kepada petugas pelaksana lapangan P2TL, harus dilakukan beberapa saat sebelum petugas berangkat ke lokasi. Untuk mencegah terjadi kebocoran informasi.”

	b. Tahap Pemeriksaan P2TL	“lalu bagaimana tata cara tahap pemeriksaan Pak?”	“tata caranya, petugas P2TL harus menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada pelanggan, kemudian meminta pendampingan dari pihak pelanggan untuk menyaksikan, terus jangan mendekati apalagi menyentuh APP sebelum penghuni menyaksikan proses pemeriksaan, kemudian petugas membuat berita acara pemeriksaan, dan petugas P2TL harus bersikap sopan selama proses pemeriksaan,”
		“Kenapa petugas P2TL tidak boleh mendekati atau menyentuh APP sebelum pelanggan menyaksikan proses pemeriksaan?”	“karena, untuk menghindari dugaan perusakan segel oleh petugas p2tl sebelum diadakan pemeriksaan mas.”
	c. Tahap pasca pemeriksaan P2TL	“lalu tata cara di tahap pasca pemeriksaan P2TL, apa saja Pak?”	“Ditahap pasca pemeriksaan petugas administrasi menerima dokumen berita acara, untuk kemudian dilakukan analisa perhitungan tagihan susulan sesuai tetapan penanggung jawab P2TL. dan diupayakan agar pelanggan harus membayar tagihan susulan yang sudah di tetapkan sebagai bentuk tindak penyelesaian P2TL mas.”



2	<b>Kendala dan Upaya yang Harus dilakukan dalam Proses Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur</b>		
	a. Rumah target operasi kosong	“Apa yang dilakukan petugas P2TL jika rumah yang menjadi target operasi kosong Pak ?”	“Tergantung situasi dan kondisi bila memungkinkan petugas P2TL bisa meminta bantuan kepada kerabat penghuni/RT,RW/aparat desa/kelurahan sebagai saksi.”
		“Terus bagaimana bila kondisi pagar rumah target operasi tinggi dan terkunci, Pak?”	“kalo kondisinya seperti itu petugas P2TL bisa kembali di lain hari mas.”
	b. Pelanggan belum mengerti tentang P2TL	“Apakah ada dampak bagi pelaksanaan P2TL karena pelanggan yang belum/kurang mengerti tentang P2TL?”	“Ada mas, biasanya pelanggan tidak mau tanda tangan berita acara pemeriksaan”
		“lalu tindakan apa yang dilakukan oleh petugas P2TL agar pelanggan mau tanda tangan berita acara?”	“jika terjadi hal tersebut, petugas P2TL harus menjelaskan dengan perlahan dan jelas, bahwa penanda tangan berita acara itu hanya kelengkapan berkas bahwa telah terjadi pemeriksaan P2TL di lokasi tersebut.”
	c. Pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN	“apa tindakan yang dilakukan pihak PLN jika pelanggan tidak memenuhi panggilan untuk menyelesaikan P2TL?”	“petugas administrasi P2TL akan membuat surat panggilan ke 2 dan ke panggilan3 mas.”
		“Lalu bagaimana bila pelanggan tersebut tetap tidak memenuhi panggilan PLN?.	“apabila setelah surat panggilan III pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN, maka petugas administrasi P2TL akan membuat surat peringatan I yang

			<p>berisi tagihan susulan, kemudian ada surat peringatan II setelah itu bila pelanggan masih belum memenuhi panggilan PLN, maka PLN akan mengirimkan petugas untuk melaksanakan pembongkaran rampung APP mas.”</p>
--	--	--	--

Gambar Kantor PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur



Gambar Pemeriksaan P2TL



Gambar Proses Pengecekan APP Meter



Gambar Surat Penetapan Tagihan Susulan P2TL (P3)

PT. PLN (PERSERO) UID JAWA TENGAH DAN DIY  
UP3 TEGAL  
ULP TEGAL TIMUR

Bayan 13 Apr

**PENETAPAN TAGIHAN SUSULAN P2TL**  
Nomor: 00002/TAGSUS/04/2021

Nama : ..... Noagenda : P2TL/52252/20210413/00002  
IDPEL/NOPEL : ..... / XX1417278 No Ba : 036347 13-04-20  
Tarif / Daya : R1T/1300 No Register : S225243005300  
Alamat : DS KARANGMULYA RT.1 RW. 8 KARANGMULY  
Golongan Pelanggan : P3

**I. BIAYA BEBAN DAN BIAYA PEMAKAIAH KWH**

1. Biaya Beban =  $6 \times 2 \times \text{Rekening Minimum Pelanggan Tarif Daya Listrik}$  901,493  
 $6 \times 2 \times \text{Rp. } 76.124,40$

2. Biaya Pemakaian =  $9 \times 720 \text{ jam} \times \text{days tersambung} \times 0,85 \times \text{Harga per KWH Tertinggi dalam golongan tarif bersangkutan sesuai TOL yang berlaku.}$   
 $9 \times 720 \times 1,30 \times 0,85 \times \text{Rp. } 1,444,700$  10,344,830

Jumlah : 11,246,123

**II. BIAYA LAIN-LAIN**

Biaya Material Rp. 10,000

Jumlah I + II Jumlah Rp. 11,256,123

Bagi pelanggan yang tidak melunasi kewajiban sampai dengan batas waktu yang ditentukan (30 hari dari tanggal Berita Acara yaitu 13-05-2021), maka PLN akan memblokir pembelian stroom atau token isi ulang.

TEGAL, 13-04-2021

Mengetahui  
Manajer  
MARGIATI

Pelanggan  
( PAMSIMAS TIRTA KEN )  
Sutan no  
.....

SUPERVISOR  
PELAYANAN PELANGGAN  
Randyabo

Gambar Berita Acara P2TL hal 1

Lampiran 1 - 5.1  
Peraturan Direksi PT PLN (Persero)  
Nomor: DBB-2.P/DIA/2016  
Tanggal: 6 Juni 2016

PT PLN (Persero)

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN  
PENERTIBAN PEMAKAIAH TENAGA LISTRIK (P2TL)  
INSTALASI /SAMBUNGAN LISTRIK 1 FASA**

NOMOR : .....

pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
No. Induk : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
No. Induk : .....  
Jabatan : .....

masing-masing sebagai Petugas Pelaksana Lapangan P2TL, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ..... tanggal ..... dengan didampingi oleh Petugas dari PPNS/PCLRI:

1. Nama : .....  
NIP/NRP : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
NIP/NRP : .....

berdasarkan Surat Tugas dari : ..... tanggal .....  
Nomor : .....

telah melaksanakan P2TL dengan cara pemeriksaan Instalasi Sambungan Tenaga Listrik Pelanggan / Non PLN pada bangunan atau persil, dengan data sebagai berikut :

- No. Gardu / Trafo : .....

- Nama / Alamat dalam rekening : .....

- ID Pelanggan : .....

- Tarip/Daya tersambung / Peruntukan : .....

Dengan disaksikan oleh Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Kartu Identitas (KTP / SIM dll) : .....

Pekerjaan : .....

Yang....

Gambar Berita Acara P2TL hal 2

yang bertanggungjawab atas Bangunan atau Peralis yang diperiksa tersebut, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

**A. KONDISI APP SEBELUM DAN SESUDAH DIPERIKSA**

NO	PERALATAN	SATUAN	SEBELUM DIPERIKSA	SETELAH DIPERIKSA
1.a	<b>KWH meter</b>		Ada / tidakada	Ada / tidakada
	- Merk			
	- Tahun			
1.b	<b>Segelterpasang</b>	buah	Baik / Tidak	Baik / Tidak
	- Jenis		Plastik/ Timah	Plastik/ Timah
	- Tahun			
2.a	<b>PEMBATAS</b>		Baik / tidak	Baik / tidak
	- Kapasitas	A		
	- Merk			
2.b	<b>Segelterpasang</b>	buah	Plastik/ Timah	Plastik/ Timah
	- Jenis			
	- Tahun			
3.a	<b>PAPAN meter (OK I)</b>		Pakai / Tidak	Pakai / Tidak
	- Jenis		Kayu / Metal	Kayu / Metal
	- Tahun		Baik / Tidak	Baik / Tidak
4.	<b>PENGAWATAN APP</b>		Sesuai / tidak	Sesuai / tidak
	- Sesuai SPLN No 55 tahun .....; SPLN No. ....			
	-			

**B. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :**

1. Keadaan Instalasi Listrik dan Alat Ukur Pembatas (APP) diperiksa :  
TIDAK DITEMUKAN / DITEMUKAN PELANGGARAN.

2. Pelanggaran yang ditemukan "

.....

.....

**C. TINDAKAN YANG DILAKUKAN :**

.....

.....

.....

**D. PENYELESAIAN ...**

Gambar Berita Acara P2TL hal 3

**10. PENYELESAIAN (bila ditemukan pelanggaran)**

Untuk menyelesaikan atas Pelanggaran yang ditemukan oleh Petugas (Tim) P2TL sesuai hasil pemeriksaan tersebut diatas, Pelanggan / Pemakai yang bertanggungjawab atas pemakaian tenaga listrik di Peralis sebagaimana tersebut di atas diminta datang ke Kantor PT. PLN (Persero) yang beralamat di..... pada tanggal / jam .....

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap berikut lampirannya diberikan kepada Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/Penanggung Jawab Bangunan atau Peralis seperti pada angka 11 di atas.

Pelanggan/Pemakai/Penghuni/Wakil Pelanggan/ Penanggung Jawab Bangunan atau Peralis	Tim P2TL
(.....) 2)	(.....) 2)
<b>Saksi</b>	<b>Penyidik</b>
(.....) 2)	(.....) 2)
(.....) 2)	(.....) 2)

Keterangan :  
1) Coret yang tidak perlu.  
2) Disisi nama terang dan tanda tangan masing-masing.